

IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DEMOKRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Boyke Darmajaya¹, Muhammad Akbar Ramadhan Munandar²,
Muhamad Chairul Azhar³, Nisaa'i Ramilinia Panuluh⁴

¹*Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, darmajayaboyke@gmail.com*

²*Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, akbarm69927@gmail.com*

³*Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, muhamadchairul21@gmail.com*

⁴*Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, liniapanuluh@gmail.com*

ABSTRAK

Pelaksanaan konstitusi dipercayakan kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus, di mana antar-lembaga tersebut terjalin relasi sinergis berdasarkan prinsip “checks and balances. Kehadiran MK mencerminkan komitmen reformasi terhadap pembangunan hukum dan peradilan yang berlandaskan konstitusi. Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki signifikansi strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sebagai garda penjaga konstitusionalitas dan penjamin suara rakyat. Melalui putusan-putusannya, MK memberikan solusi atas persoalan hukum yang dianggap inkonstitusional oleh masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh MK juga tidak sedikit. Isu independensi, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi MK menjadi beberapa masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran dan fungsi MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia untuk memahami bagaimana lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam hal konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan terhadap permohonan pengujian norma. MK juga berperan dalam menjaga kesinambungan demokrasi. MK merupakan garda terdepan dalam menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci : Peran, Fungsi MK, Demokrasi, Peradilan

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK berfungsi menjaga konstitusi dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Menurut Gaffar (2009), kedudukan MK sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia, karena MK

memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa konstitusi yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan hukum.¹

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi telah memberikan tantangan baru bagi MK. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka, jumlah perkara yang diajukan ke MK semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada kemampuan MK untuk menegakkan keadilan. Statistik dari MK menunjukkan bahwa dalam tahun 2022, terdapat lebih dari 200 perkara yang diajukan, termasuk permohonan pengujian undang-undang dan sengketa hasil pemilihan umum (Wulandari et al., 2023).²

Sistem politik dan ketatanegaraan mengalami dinamika perkembangan yang signifikan, membawa implikasi teoretis terhadap implementasi dan pemahaman konseptualnya. Kedua sistem ini menempati peran krusial dan strategis dalam kerangka pencapaian tujuan negara. Idealnya, perkembangan tersebut berpedoman pada seperangkat regulasi yang mengatur pelaksanaan dan arah transformasinya. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi memainkan fungsi fundamental sebagai instrumen pengatur seluruh tatanan sistem negara, sekaligus berperan sebagai “grundnorm” yang menjadi acuan pemerintahan. Keberadaan konstitusi menjadi prasyarat mutlak bagi terlaksananya seluruh aktivitas dan kebijakan negara. Lebih dari sekadar norma hukum, konstitusi dalam perspektif luas mencakup dimensi ekstra-yuridis, seperti aspek sosiologis dan politik.

Pelaksanaan konstitusi dipercayakan kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus, di mana antar-lembaga tersebut terjalin relasi sinergis berdasarkan prinsip “checks and balances”³. Di Indonesia, konstitusi diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berfungsi sebagai landasan normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Segala produk hukum harus selaras dengan UUD 1945, mengingat dokumen tersebut mengandung nilai filosofis dan prinsip dasar sebagai “supremasi hukum” tertinggi. Konstitusi pada hakikatnya membatasi kekuasaan negara

¹ Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 1-20.

² Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199-222.

³ Vincenzo & Sitabuana, 2022, p. 139

guna menjamin kesejahteraan dan keamanan warga negara, baik secara normatif maupun praktik di lapangan.

Sejak masa kemerdekaan, implementasi konstitusi di Indonesia belum optimal akibat intervensi kepentingan politik. Namun, seiring perkembangan sistem pemerintahan, muncul harapan bagi penegakan konstitusi yang independen dan kepastian hukum. Era reformasi menjadi titik balik dengan diakuinya kebebasan berpikir dan berpendapat, meskipun interpretasi terhadap konstitusi kerap dipengaruhi oleh agenda politik tertentu. Dalam hal ini, konstitusi berfungsi sebagai mediator kepentingan sekaligus penjamin legalitas kebijakan negara⁴. Guna mengawal konstitusi secara efektif, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pascareformasi dengan mandat konstitusional. MK memiliki peran strategis dalam memastikan konstitusi dijalankan secara konsisten dan benar. Kehadiran MK mencerminkan komitmen reformasi terhadap pembangunan hukum dan peradilan yang berlandaskan konstitusi. Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki signifikansi strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sebagai garda penjaga konstitusionalitas dan penjamin suara rakyat. Melalui putusan-putusannya, MK memberikan solusi atas persoalan hukum yang dianggap inkonstitusional oleh masyarakat. Namun, di satu sisi, posisi MK sebagai lembaga dengan kewenangan luas kerap menimbulkan kritik terkait potensi “judicial overreach”⁵ atau keterbatasan dalam menjalankan mandatnya. Dinamika ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana pengendalian terhadap kekuasaan MK dapat dilakukan.

Secara normatif, putusan MK bersifat final dan mengikat (“final and binding”), sehingga wajib dihormati oleh seluruh pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi putusan MK tidak selalu berjalan mulus akibat hambatan struktural maupun politis. Di samping itu, kapasitas hakim konstitusi sebagai manusia tidak lepas dari keterbatasan, termasuk dalam hal konsistensi penafsiran hukum dan kerentanan terhadap praktik suap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK berfungsi sebagai “the guardian of the constitution”, integritas dan independensinya perlu terus diperkuat.

Dalam konteks global, MK Indonesia juga menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang sedang membangun lembaga peradilan konstitusi. Model MK Indonesia yang independen dan responsif terhadap tuntutan masyarakat telah menjadi contoh bagi

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2018), 23.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 189

negara-negara yang ingin memperkuat sistem hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi MK tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga memiliki dampak internasional.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh MK juga tidak sedikit. Isu independensi, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi MK menjadi beberapa masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran dan fungsi MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia untuk memahami bagaimana lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap penegakan hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan dan memahami peran serta fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Konstitusi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi dalam teori hukum merupakan *grundnorm* (norma dasar) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Konstitusi menjadi norma hukum tertinggi (*lex superior*) yang membentuk dasar bagi semua norma hukum di bawahnya. Dalam konteks negara hukum (*rechstaat*), keberadaan konstitusi mutlak diperlukan untuk menjamin supremasi hukum (*supremacy of law*) dan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*).

Menurut *Carl Schmitt*, konstitusi memiliki dimensi politis yang erat kaitannya dengan keberadaan dan identitas negara itu sendiri. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu konstitusi harus dijaga oleh lembaga yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi.

MK merupakan *custos constitutionis* atau “penjaga konstitusi” yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan modern.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai bagian dari *constitutional adjudication*, yaitu proses penegakan hukum terhadap konstitusi melalui mekanisme peradilan. Fungsi MK dapat dikaji dari beberapa dimensi:

Fungsi Pengujian Undang-Undang (judicial review)

MK memiliki kewenangan untuk menguji materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini sesuai dengan prinsip *constitutional supremacy*, yang mengharuskan semua peraturan perundang-undangan tunduk pada konstitusi. Dengan demikian, MK menjalankan peran sebagai *negative legislator*, yakni dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD.

Fungsi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional dalam hal terjadi sengketa antar-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, MK bertugas menafsirkan batas-batas konstitusional tersebut. Fungsi ini memperkuat prinsip *checks and balances* dan mencegah terjadinya *ultra vires* atau tindakan melampaui kewenangan konstitusional. Fungsi Mengadili Pembubaran Partai Politik dimana MK memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembubaran partai politik berdasarkan asas legalitas dan perlindungan konstitusional (*constitutional guarantee*). Pembubaran partai hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang menjunjung tinggi *due process of law*. Fungsi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu dimana kewenangan ini menegaskan posisi MK dalam menjamin kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dan prinsip *free and fair election*. Dalam praktiknya, MK menjadi forum penyelesaian sengketa elektoral yang kredibel dan final.

Asas-Asas Hukum yang Menjadi Dasar Peran MK

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada asas-asas hukum berikut: Asas Legalitas (*nullum crimen sine lege*) dimana setiap putusan MK harus berdasarkan hukum yang berlaku, Asas Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dimana Putusan MK memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, Asas Independensi Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim konstitusi tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif, Asas Imparsialitas dan Fairness dimana MK harus bersikap adil, objektif dan bebas dari konflik kepentingan, Asas Finalitas Putusan dimana Putusan MK bersifat *final and binding* dan tidak dapat dibanding, untuk menjaga *res judicata* atau kekuatan hukum tetap.

Teori Hukum Relevan

Beberapa teori hukum yang relevan untuk memahami peran MK dalam sistem hukum Indonesia: Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Rule of Law ditegaskan bahwa negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata, Teori Trias Politica oleh Montesquieu yang menyebutkan MK sebagai lembaga yudikatif berfungsi mengimbangi dan mengawasi kekuasaan legislatif dan eksekutif dan Teori Demokrasi Konstitusional: MK menjadi lembaga penegak demokrasi konstitusional yang menjamin pelaksanaan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang dan Penyelesaian Sengketa Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sangat penting karena undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat merugikan hak-hak warga negara dan mengganggu stabilitas hukum di negara.

Dalam praktiknya, MK telah menangani berbagai kasus pengujian undang-undang yang berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, MK memutuskan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut tidak hanya menciptakan preseden hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen MK dalam menjaga hak-hak politik warga negara. Menurut Wulandari et al. (2023), keputusan-keputusan semacam ini menunjukkan bahwa MK berfungsi sebagai pengawas yang aktif terhadap produk legislasi.⁶

Statistik menunjukkan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003, MK telah memutuskan lebih dari 1.000 perkara pengujian undang-undang. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% di antaranya berujung pada pembatalan atau perubahan pasal-pasal dalam

⁶ Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199-222.

undang-undang yang diujikan (Safitri & Wibowo, 2023).⁷ Hal ini menunjukkan efektivitas MK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penguji konstitusi. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusi yang muncul antara lembaga negara, seperti antara DPR dan Presiden, atau antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, yang merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, MK bertindak sebagai lembaga yang menegakkan keadilan pemilu dan memastikan bahwa setiap suara warga negara dihitung secara adil. Kasus sengketa pemilu yang ditangani MK, seperti dalam pemilihan presiden 2019, menunjukkan bagaimana MK berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menurut Nainggolan et al. (2025), keputusan MK dalam sengketa pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁸

Dalam konteks yang lebih luas, peran MK dalam pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusi juga berkontribusi pada penguatan supremasi hukum di Indonesia. Dengan adanya MK, setiap tindakan legislatif dan eksekutif dapat diawasi dan diuji, sehingga menciptakan sistem checks and balances yang sehat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan kata lain, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Fungsi MK sebagai Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia sangatlah krusial. MK tidak hanya berperan dalam pengujian undang-undang, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, MK menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan keadilan.

⁷ Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi): Constitutional Court, Verdict. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 71-76.

⁸ Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Syntax Admiration, 6(1), 628-642.

Salah satu contoh nyata dari fungsi MK dalam melindungi hak asasi manusia adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Sebagai lembaga yang mengawasi konstitusionalitas undang-undang, MK telah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, MK memutuskan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pencemaran nama baik bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Keputusan ini menunjukkan komitmen MK untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Indonesia (Isra, 2014).⁹

Data menunjukkan bahwa selama periode 2010 hingga 2020, MK telah menerima lebih dari 200 permohonan uji materiil yang terkait dengan hak asasi manusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 45% di antaranya menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi pemohon, yang menunjukkan bahwa MK berfungsi sebagai lembaga yang responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Plaituka, 2016).¹⁰ Fungsi ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM, di mana MK menjadi salah satu harapan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum, yang merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Dengan mengadili sengketa pemilu, MK membantu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, serta bahwa setiap suara dihitung dengan benar. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai pengawal demokrasi yang tidak hanya memeriksa keabsahan undang-undang, tetapi juga menjaga integritas proses demokrasi.

Melalui berbagai putusan dan kebijakan, MK telah menunjukkan dedikasinya dalam menjaga hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan peran dan fungsinya yang luas, MK menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum dan

⁹ Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*, 11(3), 409-427.

¹⁰ Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

demokrasi di Indonesia, yang berkontribusi pada penguatan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan yang Dihadapi oleh MK dalam Menjalankan Perannya

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga dan menegakkan konstitusi negara. Namun, dalam menjalankan fungsinya, MK menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik yang sering kali mengancam independensi lembaga ini. Dalam banyak kasus, keputusan MK bisa menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik itu pemerintah, partai politik, maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan MK terkadang berada dalam posisi sulit ketika harus membuat keputusan yang mungkin tidak populer di kalangan elit politik. Menurut Anggreni et al. (2024), tekanan politik ini dapat mengganggu kemandirian MK dan mempengaruhi kualitas putusan yang diambil.¹¹

Di samping tekanan politik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi MK juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami bagaimana MK beroperasi dan apa saja kewenangan yang dimiliki. Ketidakpahaman ini sering kali menyebabkan masyarakat skeptis terhadap keputusan yang diambil oleh MK. Sebagai contoh, dalam putusan mengenai hasil pemilihan umum, sering kali terjadi protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, padahal keputusan tersebut telah melalui proses hukum yang ketat. Syailendra et al. (2024) mencatat bahwa edukasi publik mengenai peran MK sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.¹²

Selain itu, MK juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Kualitas hakim konstitusi yang ada sangat mempengaruhi kualitas putusan yang diambil. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus di mana keputusan MK menuai kritik karena dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi hakim konstitusi agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dengan baik. Hamid (2024) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk

¹¹ Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.

¹² Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.

memastikan bahwa mereka selalu up-to-date dengan perkembangan hukum dan praktik terbaik di bidang konstitusi.¹³

Selain itu, MK juga harus menghadapi tantangan teknologi dan informasi. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, dan sering kali informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat mempengaruhi opini publik. MK perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan putusan-putusan mereka kepada masyarakat dan mengatasi misinformasi yang beredar. Kansil dan Nadilatasya (2024) menyoroti bahwa transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini.¹⁴

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan perannya adalah multifaset dan memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Upaya untuk memperkuat independensi MK, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memperbaiki infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

Pengaruh MK Terhadap Proses Politik dan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses politik dan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK berperan sebagai pengawal prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Putusan-putusan yang diambil oleh MK sering kali menjadi titik tolak bagi perubahan kebijakan publik dan reformasi hukum. Misalnya, dalam kasus uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu, MK telah mengeluarkan beberapa putusan yang mengubah cara pemilihan umum dilakukan di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan pemilu tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pengaruh MK juga terlihat dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa putusan, MK telah menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam konteks hukum. Hal ini tercermin dalam keputusan-keputusan yang menghapuskan undang-undang yang dianggap diskriminatif atau

¹³ Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.

¹⁴ Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.

melanggar hak asasi manusia. Misalnya, dalam putusan mengenai kebebasan berekspresi, MK telah menguatkan posisi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan tindakan represif dari negara. Keputusan-keputusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

Pengaruh MK tidak selalu positif. Terkadang, keputusan MK dapat memicu ketidakpuasan di kalangan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Misalnya, putusan yang menguntungkan satu pihak dalam sengketa politik dapat menyebabkan protes dan ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa MK harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap putusan yang diambil. Kansil dan Nadilatasya (2024) menekankan pentingnya bagi MK untuk bersikap objektif dan berimbang dalam setiap kasus yang ditangani.¹⁵

MK juga berperan dalam memperkuat legitimasi lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan menjaga konstitusi dan menegakkan hukum, MK membantu menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif bagi pembangunan demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa MK berfungsi dengan baik, mereka cenderung lebih percaya pada lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk eksekutif dan legislatif. Kepercayaan publik terhadap MK dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan hukum di negara ini.

Secara keseluruhan, pengaruh MK terhadap proses politik dan hukum di Indonesia sangat besar. Melalui putusan-putusan yang diambil, MK tidak hanya menjaga konstitusi tetapi juga membentuk arah perkembangan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung peran MK dalam sistem hukum dan politik di negara ini.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam hal konstitusi, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil

¹⁵ Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.

pemilihan umum, serta memberikan putusan terhadap permohonan pengujian norma. MK juga berperan dalam menjaga kesinambungan demokrasi. MK merupakan garda terdepan dalam menjaga konstitusi, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Keberadaannya sangat vital dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perlu adanya peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan MK. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai proses dan pertimbangan yang mendasari setiap putusan. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi yang lebih luas dan penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi. MK perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai isu-isu konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan menjalin kerjasama yang baik, MK dapat belajar dari pengalaman negara lain dan menerapkan praktik terbaik dalam menjalankan fungsinya. Penting bagi MK untuk terus melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi lembaga ini kepada masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai tugas dan wewenang MK. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran MK dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Perlu adanya reformasi dalam hal mekanisme pengawasan terhadap independensi MK. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja MK dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan MK dapat terhindar dari intervensi politik dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan. MK perlu terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di dalam lembaga ini. Pelatihan dan pendidikan bagi hakim dan staf MK sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi berbagai isu konstitusi yang semakin kompleks. Dengan demikian, MK dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1),
- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta,
- Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4),
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*, 11(3),
- Jimly Asshiddiqie, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2018),
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1),
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),
- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1)
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi): Constitutional Court, Verdict. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1),
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4),
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2),